

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori

2.1.1 Manajemen

Moekijat berpendapat manajemen adalah proses penggunaan sumber daya bahan dan manusia untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Proses ini meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan penilaian orang-orang untuk mencapai tujuan ini (Moekijat 1986, 11). Menurut Malayu manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Malayu 2017).

Ir. Tom Degenars berpendapat manajemen didefinisikan sebagai suatu proses yang berhubungan dengan bimbingan suatu kelompok dan berdasarkan atas tujuan yang jelas yang harus dicapai dengan menggunakan sumber-sumber tenaga manusia dan bukan tenaga manusia (Handyaningrat 1994, 19). George R. Terry berpendapat manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Handyaningrat 1994, 20).

2.1.2 Fungsi-fungsi Manajemen

Wiliam H. Newman menyebutkan fungsi manajemen terdiri atas beberapa proses antara lain: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengumpulan sumber (*assembling resources*), pengendalian kerja (*supervising*) dan pengawasan (*controlling*) (Handayani 1994, 20). Luther Gulick menyebutkan proses administrasi dan manajemen terdiri atas beberapa proses antara lain: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan pegawai (*staffing*), pembinaan kerja (*directing*), pengkoordinasian (*coordinating*), pelaporan (*reporting*) dan anggaran (*budgeting*) (Handayani 1994, 24).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas manajemen merupakan proses organisasi yang terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan sumber daya, penyusunan pegawai, pembinaan dan pengarahan kerja, pengkoordinasian hingga pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan tersebut. Koordinasi menjadi salah satu fungsi manajemen seperti yang disebut oleh Gulick. Gulick juga mengatakan bahwa koordinasi merupakan kewajiban yang penting untuk menghubungkan berbagai-bagai kegiatan daripada pekerjaan. Rangkaian fungsi manajemen tersebut menjadi rangkaian untuk tercapainya manajemen dengan efektif.

2.1.3 Koordinasi

Kata koordinasi berasal dari kata *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Secara pendekatan empirik bila dikaitkan dengan segi etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi dan mengatur atau menyepakati bersama hal tertentu (Ndraha 2015, 290). Menurut Ndraha, koordinasi adalah proses penyepakatan-bersama-secara-mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain, keberhasilan pencapaian yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain (Ndraha (2015, 291). Menurut G.R. Terry mengatakan koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan (Malayu 2011, 85).

E.F.L. Brech berpendapat koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan 2007, 85). Mc. Farland berpendapat koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama (Handyaningrat 1994, 89). Handoko mendefinisikan koordinasi

sebagai proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional), suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien (Rachmat 2018, 163).

Berdasarkan berbagai pendapat ahli di atas, koordinasi adalah kegiatan organisasi (dalam hal ini instansi) yang teratur dan sinkron untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan/atau kewajiban tertentu dalam menjalankan garis komando dan garis tanggung jawab sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Koordinasi memiliki peranan yang penting dalam instansi karena mempengaruhi pelaksanaan tugas dan/atau kewajiban suatu instansi dimana koordinasi dapat membantu instansi dalam mencegah terjadinya kesalahpahaman, kekacauan dan konflik atau bahkan kekosongan pekerjaan serta menjadi alat untuk memelihara hubungan antar bagian dalam instansi dan/atau antar instansi dalam menyelaraskan pelaksanaan tugas dan/atau kewajiban untuk mencapai tujuan.

Dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak berperan sebagai koordinator pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Landak bersama badan/instansi terkait lainnya. Dengan memimpin penyelenggaraan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui kerja sama dan penyelarasan kegiatan, untuk mencegah terjadinya kekacauan dan konflik antar badan/instansi yang masing-masing memiliki ide dan prinsip yang berbeda, agar tercapainya tujuan bersama yaitu pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang optimal di Kabupaten Landak.

2.1.4 Koordinasi dan Hubungan Kerja dalam Pemerintahan

Menurut Handayani (1988, 117) Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administratif yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasilguna dan berdayaguna (efektif dan efisien). Sedangkan Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi dan hubungan kerja adalah dua hal yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini dikarenakan koordinasi hanya dapat dicapai apabila dilakukannya hubungan kerja yang efektif dan efisien pula.

2.1.5 Tujuan Koordinasi

Terdapat 3 (tiga) tujuan koordinasi menurut Ndraha (2015, 295) antara lain sebagai berikut:

- a. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan kesinambungan, antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.
- b. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- c. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Berdasarkan tujuan koordinasi di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan koordinasi adalah untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan

melalui penyerasian dan penyatu-paduan kerja guna mencapai tujuan bersama dan mencegah adanya konflik atau masalah yang dapat mengganggu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama tersebut.

2.1.6 Ciri-Ciri Koordinasi

Menurut Handayani (1988, 118) terdapat beberapa ciri koordinasi antara lain sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Pimpinan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam berjalannya koordinasi. Sehingga pimpinan yang berhasil dikatakan sebagai hasil dari koordinasi yang baik.
- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Untuk dapat mencapai koordinasi dengan baik diperlukan pula kerjasama yang menjadi syarat mutlak terselenggaranya koordinasi.
- c. Koordinasi adalah proses yang terus-menerus (*continues process*). Koordinasi menjadi proses yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan organisasi.
- d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Koordinasi menjadi hal yang terkonsep dengan baik dan diterapkan oleh kelompok dan bukan hanya individu dalam organisasi.
- e. Konsep kesatuan tindakan. Kesatuan tindakan adalah inti koordinasi dimana pimpinan wajib mengatur usaha dan/atau tindakan individu dalam kelompok agar terbentuk keserasian dalam mencapai tujuan bersama.
- f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common purpose*). Dalam mencapai kesatuan usaha dan/atau tindakan, individu dan kelompok dalam suatu organisasi juga diharapkan turut serta dalam melaksanakan tujuan bersama.

Berdasarkan ciri koordinasi di atas, dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan tanggung jawab pimpinan yang berperan sebagai koordinator penyelenggaraan suatu kegiatan berupa arahan yang terkonsep untuk mengatur dan menciptakan kerja sama secara berkelanjutan dan berkesinambungan guna mencapai kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama dan bukan tujuan individu atau kelompok tertentu.

2.1.7 Tipe-Tipe Koordinasi

Menurut Malayu (2011, 88) terdapat beberapa tipe koordinasi antara lain koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal (*vertical coordination*) adalah kegiatan penyatuan dan pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap kegiatan unit-unit atau satuan-satuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Sedangkan koordinasi horizontal (*horizontal coordination*) adalah kegiatan penyatuan dan pengarahan yang dilakukan dalam tingkat unit atau satuan kerja setingkat.

2.1.8 Bentuk Koordinasi

Menurut Handyaningrat (1988, 127) terdapat dua (2) bentuk koordinasi sebagai berikut:

- a. Koordinasi Internal yaitu koordinasi yang terjadi dalam suatu instansi dan koordinasi ini dilakukan oleh antar pegawai di instansi itu sendiri. Koordinasi internal terdiri dari koordinasi vertikal, koordinasi horizontal dan koordinasi diagonal.
 1. Koordinasi vertikal, yaitu koordinasi struktural yang terjadi dan dilakukan oleh bidang atau pejabat kepada bidang atau pejabat yang berada dalam satu hirarki dan dalam satu garis komando. Seperti Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Landak kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Landak.
 2. Koordinasi horizontal, yaitu koordinasi fungsional yang terjadi dan dilakukan oleh antar bidang-bidang atau pejabat-pejabat yang memiliki kedudukan setingkat eselonnya. Seperti Kepala Bidang

Pencegahan dan Kesiapsiagaan kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Landak.

3. Koordinasi diagonal, yaitu koordinasi fungsional yang terjadi dan dilakukan oleh bidang-bidang atau pejabat-pejabat kepada bidang-bidang atau pejabat-pejabat yang kedudukannya dibawah dan berada dalam garis komando yang berbeda. Seperti Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan kepada staff bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Landak.
- b. Koordinasi Eksternal yaitu koordinasi yang dilakukan antar instansi dengan instansi lainnya yang memiliki tugas atau tanggung jawab yang sama terhadap satu hal. Koordinasi eksternal terdiri dari koordinasi eksternal bersifat horizontal dan koordinasi eksternal bersifat diagonal.
 1. Koordinasi eksternal bersifat horizontal, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh antar bidang atau pejabat yang kedudukan eselonnya setingkat dari instansi yang berbeda. Seperti Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Landak dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Landak.
 2. Koordinasi eksternal bersifat diagonal, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh bidang atau pejabat dari suatu instansi kepada bidang atau pejabat instansi lainnya yang kedudukan eselonnya tidak setingkat. Seperti Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Landak kepada Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan

Lingkungan (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Landak.

2.1.9 Indikator Koordinasi

Menurut Handayani (1988, 80) terdapat beberapa indikator koordinasi antara lain sebagai berikut:

a. Komunikasi.

Handayani menyatakan bahwa komunikasi sebagai indikator koordinasi dilihat dari ada tidaknya informasi, ada tidaknya alur informasi dan ada tidaknya teknologi informasi.

b. Kesadaran pentingnya koordinasi.

Handayani menyatakan bahwa kesadaran pentingnya koordinasi sebagai indikator koordinasi dilihat dari adanya tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi dan tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi.

c. Kompetensi partisipan.

Handayani menyatakan bahwa kompetensi partisipan sebagai indikator koordinasi dilihat dari ada tidaknya pejabat berwenang yang terlibat dan ada tidaknya ahli yang terlibat di bidang pembangunan.

d. Kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi.

Handayani menyatakan kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi sebagai indikator koordinasi dilihat dari ada tidaknya bentuk kesepakatan, ada tidaknya pelaksana kegiatan, ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan dan ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi.

e. Kontinuitas perencanaan.

Handayaniingrat menyatakan kontinuitas perencanaan sebagai indikator koordinasi dilihat dari ada tidaknya umpan balik dari objek dan subjek pembangunan dan ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan.

Dari indikator-indikator koordinasi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya, koordinasi dapat dinilai berdasarkan indikator-indikator tersebut. Hal ini dilakukan dengan dinilainya apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum berdasarkan masing-masing indikator. Maka peneliti menggunakan pendapat Handayaniingrat mengenai indikator koordinasi untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Landak.

2.1.10 Teknik Koordinasi (pendekatan Manajemen)

Teknik koordinasi dalam tahapan proses manajemen menurut James A.F. Stoner (Rachmat 2018, 164) dijabarkan sebagai berikut.

- a. Koordinasi dalam perencanaan untuk mengintegrasikan berbagai perencanaan yang dibahas dan didiskusikan melalui diskusi atau tukar pikiran.
- b. Koordinasi dalam pengorganisasian sangat diperlukan manajemen dalam distribusi tugas seperti dalam pembagian tugas yang bertanggung jawab mengerjakan tugas tertentu yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

- c. Koordinasi dalam *staffing* atau penempatan pekerja pada posisi atau tanggung jawab yang tetap, berkenaan dengan kapabilitas dan kemampuan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu.
- d. Koordinasi dalam *directing* untuk peningkatan efektivitas pencapaian tujuan melalui pengarahan, penginstruksian dan pengkoordinasian suatu tugas tertentu.
- e. Koordinasi dalam pengawasan sebagai penjaminan telah tersinkronnya suatu koordinasi dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dimaksudkan sebagai pembanding bagi peneliti dalam menyusun Skripsi ini. Hasil penelitian yang relevan ini peneliti peroleh dari skripsi peneliti terdahulu yang membahas tema penelitian yang sama.

1. Skripsi “Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018”

Penelitian dan skripsi ini dilakukan dan disusun oleh Hendra Wahyudi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura pada tahun 2021. Penelitian ini dilatar-belakangi karena kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat menimbulkan dampak isu dan kerugian secara ekonomi, ekologis serta sosial yang besar sehingga

kapabilitas pemerintah daerah tidak luput dari perhatian nasional dan negara tetangga (Singapura dan Malaysia). Dalam skripsi tersebut pula dimuat bahwa pemerintah tingkat daerah selama dua tahun terakhir menyatakan ketidakmampuan dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan dengan menetapkan status darurat kabut asap dan meminta bantuan dari pemerintah pusat. Penyebab kebakaran hutan dan lahan yang dimuat dalam skripsi tersebut menyatakan bahwa di Kabupaten Kubu Raya sendiri kebakaran hutan dan lahan secara garis besar disebabkan oleh pembukaan lahan pertanian oleh masyarakat dan *land clearing* untuk perkebunan. Pembukaan lahan yang dilakukan dengan membakar tersebut menimbulkan perembetan api.

Penelitian deskriptif kualitatif oleh Hendra Wahyudi ini mengkaji tentang koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kubu Raya dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tahun 2018 yang dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi yaitu teori oleh Hasibuan yang terdiri dari: kesatuan tindakan, komunikasi dan pembagian kerja. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi dengan teknik pemeriksaan data menggunakan teknik triangulasi dan saturasi data. Fokus penelitian ini difokuskan pada koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Kubu Raya tahun 2018. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana koordinasi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2018. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2018.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum terjalannya kesatuan tindakan dalam koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, komunikasi telah terlaksana dengan cukup baik namun belum sepenuhnya disosialisasikan kepada pihak Kecamatan Sungai Raya maupun masyarakat sekitar, sedangkan pembagian kerja dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang komando siaga darurat (Peraturan No. 403/BPBD/2017) dan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran hutan dan lahan yang belum berjalan secara efektif karena instansi belum berhasil berperan dalam upaya penyelesaian masalah dimana masalah pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan adalah masalah yang kompleks yang harus ditangani bersama.

Berdasarkan uraian skripsi oleh Hendra Wahyudi di atas, terdapat beberapa persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain: jenis dan pendekatan penelitian; instansi pemerintahan yang dituju; kajian yang dibahas; dan isu yang dibahas. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini antara lain: lokasi dan waktu penelitian; aspek kajian yang

dibahas; dan teori yang digunakan dalam penelitian. Dari perbedaan yang disebutkan di atas, maka identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian relevan ini berbeda pula dengan penelitian ini.

2. Skripsi “Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019”

Penelitian dan skripsi ini dilakukan dan disusun oleh Marieta Devi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak pada tahun 2021. Penelitian yang dilatar-belakangi oleh keadaan geografis Kabupaten Kubu Raya yang memiliki lahan gambut dan mengandung mineral yang mudah terbakar serta pada tahun 2019 mengalami musim kemarau berkepanjangan sehingga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai metode dan prosedur pembukaan lahan dan minimnya fasilitas pembukaan lahan juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya. Selain itu pula sebaran titik panas (*hotspot*) di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2019 berjumlah 1753 titik.

Penelitian deskriptif kualitatif oleh Marieta Devi ini mengkaji tentang fungsi-fungsi pemerintah berdasarkan teori Ndraha yaitu fungsi pemerintahan primer dan sekunder. Berdasarkan teori fungsi menurut Ndraha, pemerintah memiliki dua fungsi utama antara lain fungsi primer

dan fungsi sekunder. Penelitian ini difokuskan pada fungsi pemerintah primer saja. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana fungsi primer Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2019. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana fungsi primer pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2019.

Hasil penelitian antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai *leading sector* dalam pencegahan, penanganan dan penanggulangan pasca bencana kebakaran hutan dan lahan memiliki dua (2) program pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang sudah dijalankan namun pada pelaksanaannya terdapat berbagai kendala antara lain: rendahnya partisipasi masyarakat dan buruknya fasilitas pendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan di desa seperti sumur bor yang dibuat tidak bisa digunakan serta sekat kanal dan embung air juga hanya terdapat satu saja pada satu dari dua desa subjek penelitian. Selain itu pula keadaan geografis Kabupaten Kubu Raya yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang tinggi.

Berdasarkan uraian skripsi oleh Marieta Devi di atas terdapat persamaan dengan penelitian ini antara lain: jenis dan pendekatan penelitian; instansi pemerintahan yang dituju; dan isu yang dibahas. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini antara lain: lokasi dan waktu penelitian; kajian yang dibahas; aspek kajian yang dibahas; dan teori yang

digunakan dalam penelitian. Dari perbedaan yang disebutkan di atas, maka identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian relevan ini berbeda pula dengan penelitian ini.

3. Jurnal “Pola Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam Mencegah dan Menanggulangi Bencana Asap di Riau”

Penelitian dan jurnal tersebut dilakukan dan disusun oleh Firman Wahyudi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Penelitian ini dilatar-belakangi oleh peneliti merasa pola komunikasi sangat diperlukan agar komunikasi dan informasi yang disampaikan oleh atasan dapat dipahami oleh bawahan, dimana pola komunikasi pula diperlukan dalam koordinasi dan komando seperti pada pelaksanaan *briefing* sebelum pelaksanaan kegiatan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau. Berdasarkan penjelasan yang dimuat dalam jurnal tersebut bencana asap yang terjadi di Provinsi Riau menimbulkan masalah, salah satunya masalah Kesehatan.

Berdasarkan pernyataan Satgas BPBD dan Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam jurnal tersebut menyebutkan bahwa terdapat 97.139 jiwa yang terserang sakit dengan luas lahan yang terbakar pada tahun 2015 adalah 5605,25 Ha. Dari total luas lahan yang terbakar tersebut, 5587,75 Ha berhasil dipadamkan dengan kerugian yang mencapai 200 Triliun. Selain itu pula keadaan geografis Provinsi Riau membuat Provinsi Riau memerlukan badan yang atau alat yang mempunyai bentuk komunikasi

yang baik dan sifatnya terpadu dalam menghadapi potensi bencana serta rencana yang baik dalam penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana asap di Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian jurnal oleh Firman Wahyudi di atas terdapat persamaan dengan penelitian ini antara lain: jenis dan pendekatan penelitian serta instansi pemerintahan penelitian yang dituju. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini antara lain: lokasi dan waktu penelitian; kajian yang dibahas; isu yang dibahas; dan teori yang digunakan dalam penelitian. Dari perbedaan yang disebutkan di atas, maka identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian relevan ini berbeda pula dengan penelitian ini.

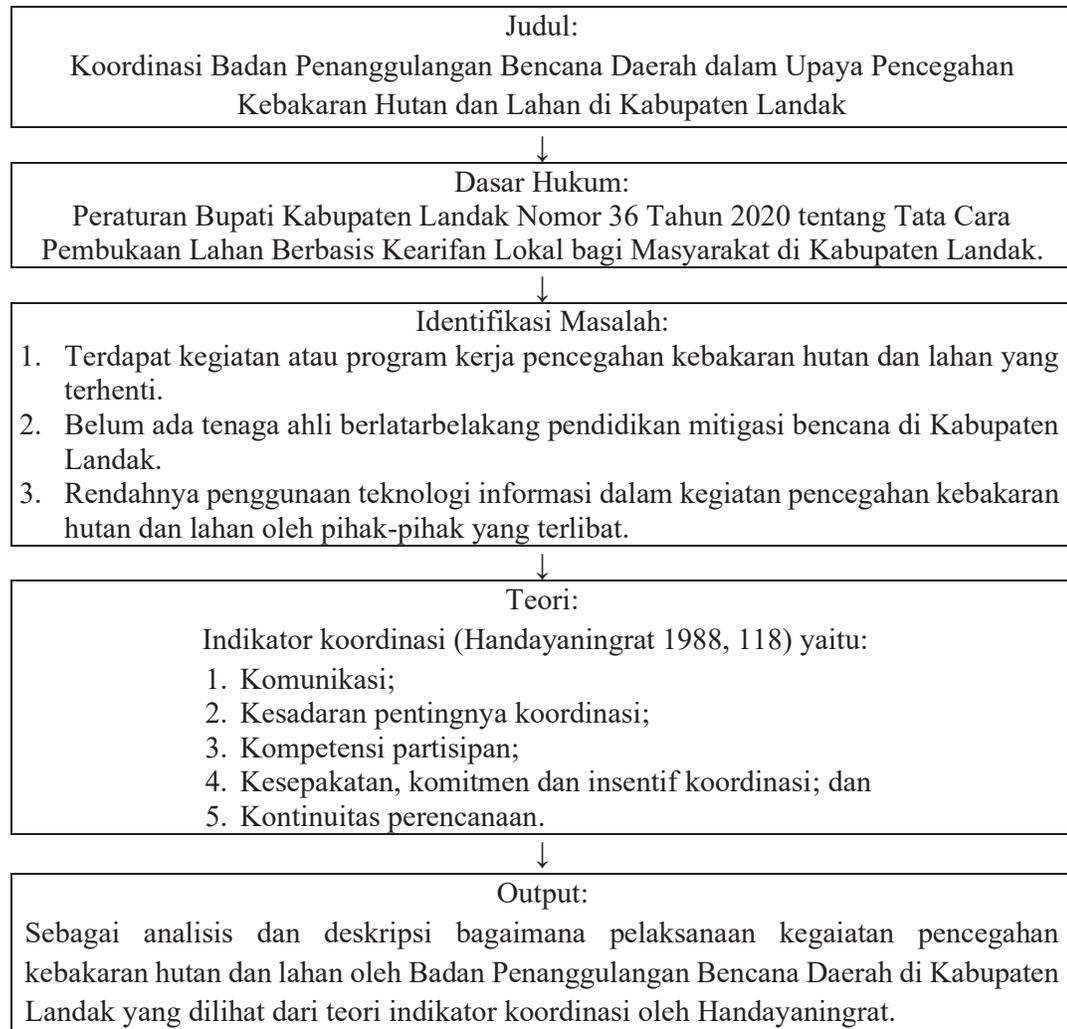
2.3 Alur Pikir Penelitian

Multi dampak di berbagai aspek yang timbul akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan baik secara regional, nasional bahkan internasional dan dipengaruhi oleh keadaan geografis Kabupaten Landak membuat kebakaran hutan dan lahan menjadi isu yang hangat dan menarik untuk diteliti lebih dalam. Bencana ini menjadi perhatian banyak pihak terutama pemerintah sehingga melibatkan banyak badan/instansi terkait dalam pencegahan, penanganan hingga penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak berperan sebagai koordinator bagi

badan/instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan pencegahan, penanganan hingga penanggulangan bencana di Kabupaten Landak.

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Landak yang berfokus di Desa Salatiga Kecamatan Mandor Kabupaten Landak seperti di atur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 36 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal bagi Masyarakat di Kabupaten Landak. Dalam alur pikir penelitian ini terdapat fenomena yang teridentifikasi, yang kemudian akan peneliti analisis menggunakan teori indikator koordinasi oleh Handayaniingrat. Dalam penelitian ini, alur pikir penelitian dibuat dan digambarkan dalam sebuah gambar sebagai berikut.

Tabel 2.1
Alur Pikir Penelitian



Dibuat oleh peneliti (2022)

2.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan alur pikir penelitian di atas, peneliti telah membuat beberapa pertanyaan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Landak?
2. Bagaimana kesadaran pentingnya koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Landak?
3. Bagaimana kompetensi partisipan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Landak?
4. Bagaimana kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Landak?
5. Bagaimana kontinuitas perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Landak?